

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response



PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG, TERANCAM MUNDUR LAGI

Ervita Luluk Zahara

Penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terancam mundur kembali. Proses penyelesaian proyek KCJB pun membutuhkan biaya tambahan dari pemerintah. Biaya proyek KCJB telah membengkak menjadi USD8 miliar (setara Rp114,24 triliun), atau bertambah USD1,9 miliar dari rencana awal sebesar USD6,07 miliar. Penyebabnya adalah karena terjadinya cost overrun (kelebihan biaya) dalam pengerjaannya. Proyek KCJB awalnya ditargetkan selesai di tahun 2019, kemudian mundur ke tahun 2022 dan yang terbaru targetnya mundur kembali menjadi Juni 2023. Dirut Utama PT KAI menyatakan bahwa saat ini kas PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) sudah menipis, dan jika Penyerahan Modal Negara (PMN) tidak cair di tahun ini, dapat membuat penyelesaian proyek semakin terhambat dan target terbaru yaitu pada Juni 2023 terancam mundur juga.

Adapun permasalahan proyek KCJB antara lain mulai dari biaya pembebasan lahan yang naik; permasalahan pada engineering, procurement, construction (EPC); hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan; relokasi jalur dan biaya lainnya mendorong terjadinya cost overrun tersebut. Pada intinya, proyek ini memiliki banyak permasalahan dari aspek perencanaan yang kurang matang dan pelaksanaan proyek KCJB yang tidak berjalan mulus. Hal tersebut terbukti dari adanya pembengkakan biaya proyek dan proses penyelesaian yang berjalan lamban dan gagal memenuhi target awal.

Sebagai upaya menyelamatkan proyek yang merupakan kerja sama Indonesia-China, Presiden Jokowi telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Dalam Perpres tersebut, Presiden Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai KCJB. Adapun biaya tambahan KCJB sebesar 25% ditanggung konsorsium BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China yakni Beijing Yawan HSR Co Ltd sesuai dengan komposisi saham. Kemudian, sisanya sebanyak 75% dari pembengkakan biaya proyek KCJB akan ditutup melalui utang. Sebelumnya, pada November 2021, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mendapatkan suntikan dana dari APBN sebesar Rp4,3 triliun. Suntikan dana tersebut diberikan melalui PMN kepada PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia. Terbaru, Pemerintah kembali berencana menyuntik PMN ke PT KAI sebesar Rp3,2 triliun agar proyek KCJB diharapkan dapat selesai tahun depan.

Di saat seharusnya KCJB sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun nyatanya saat ini masih banyak hambatan dan permasalahan dalam proses penyelesaian proyek KCJB. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat dan dapat memastikan agar proyek KCJB ini cepat terselesaikan. Karena, proyek ini sudah sangat meleset dari target awal penyelesaiannya dan dapat terus menambah beban keuangan negara jika tidak segera diatasi dengan serius. Selanjutnya, penting dilakukan kajian dan evaluasi atas proyek KCJB sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga dapat sebagai pembelajaran untuk mega proyek serupa lainnya.